



Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama

P-ISSN: 1907-1736, E-ISSN: 2685-3574

<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/alAdyan>

Volume 18, Nomor 1, Januari - Juni, 2023

DOI: <http://dx.doi.org/10.24042/al-adyan.v18i1.12243>

PROBLEM RELASI DIALEKTIS DAN TOLERANSI ANTAR UMAT BERAGAMA DALAM MASYARAKAT MULTIKULTURAL

Liky Faizal

UIN Raden Intan Lampung, Indonesia

*likyfaizal@radenintan.ac.id*¹

Ali Abdul Wakhid

UIN Raden Intan Lampung, Indonesia

*aliabdulwakhid@radenintan.ac.id*²

Abd. Qohar

UIN Raden Intan Lampung, Indonesia

*abd.qohar@radenintan.ac.id*³

Abstract

In a multicultural society, conflict and integration are a dialectical pair. Tension, or in sociological technical language is conflict, is a unity with pluralism (pluralism). The social relations that exist between interfaith people never run in a fixed state, but take place in a situation that continues to change from one time to another. This is in line with the human tendency itself which is always changing. According to the perspective of social exchange theory, the tendency of interfaith social relations that tend to keep changing is a normal phenomenon in the lives of religious people which always fluctuates, because religious people always touch, hang out and socially interact with each other. Through interaction between religious communities, each other gives meaning to the attitudes and social

behavior of religious people in a dialectical manner. Religious people actively and creatively interact and respond to each other. Therefore, the social environment which consists of verbal symbols, nonverbal symbols and the physical environment greatly influences how religious people interact cross-religiously. Fluctuations in interaction between religious believers occur because they are influenced by the social environment. When the social environment is positive, the interaction between religious people takes place effectively, peacefully, tolerantly and openly. On the other hand, when the social environment is not conducive, inter-religious relations are jammed.

Abstrak

Dalam masyarakat yang multikultural konflik dan integrasi merupakan pasangan dialektis. Ketegangan, atau dalam bahasa teknis sosiologis adalah konflik, merupakan satu kesatuan dengan pluralisme (kemajemukan). Relasi sosial yang terjalin di antara umat lintas agama tidak pernah berjalan dalam satu keadaan yang tetap, melainkan berlangsung dalam situasi yang terus berubah dari satu waktu ke waktu yang lain. Menurut perspektif teori pertukaran sosial, kecenderungan relasi sosial lintas agama yang cenderung terus berubah tadi sebagai fenomena biasa dalam kehidupan umat beragama yang selalu fluktuatif, karena di antara umat beragama setiap saat selalu bersentuhan, bergaul dan melakukan interaksi sosial satu sama lain. Oleh sebab itu, lingkungan sosial yang terdiri dari simbol simbol dan lingkungan fisik sangat mempengaruhi umat beragama berinteraksi secara lintas agama. Ketika lingkungan sosial bernuansa positif, maka interaksi antarumat beragama berlangsung efektif, damai, toleran dan terbuka. Sebaliknya, ketika lingkungan sosial tidak kondusif, maka hubungan antarumat beragama mengalami kemacetan. Oleh karena itu, para tokoh agama dituntut untuk terus memperluas cara pandang yang mempunyai semangat toleransi dan keterbukaan.

Kata Kunci: *Relasi; Agama; Toleransi; Multikultural*

A. Pendahuluan

Toleransi beragama dapat dikatakan sebagai simbol terpenting peradaban suatu bangsa. Rumusan dasarnya, seperti disebutkan di atas, adalah bahwa semakin toleran suatu bangsa,

semakin beradabnya¹. Oleh karena itu, toleransi menjadi syarat mutlak untuk eksis di ruang publik. Sebab salah satu tujuan toleransi beragama adalah untuk mewujudkan kerukunan dan kedamaian kehidupan dunia di antara berbagai kelompok manusia yang begitu beragam dalam segala hal.

Kesadaran toleransi beragama harus melahirkan berbagai kemungkinan sikap, seperti penerimaan dan pengakuan perbedaan, pengakuan hak dan keberadaan orang lain, dukungan dan semangat terhadap keanekaragaman ciptaan Tuhan. Namun diakui, tugas membangun kehidupan beragama yang toleran dan damai masih belum selesai, bahkan mungkin jauh dari selesai. Seiring dengan dinamika kehidupan beragama dalam beberapa tahun terakhir, ada tanda-tanda bahwa toleransi antar umat beragama semakin menurun. Dalam hal ini, ada tanda-tanda bahwa hubungan antarumat beragama telah menurun, karena toleransi tidak lagi menjadi gaya hidup umat beragama.²

Perubahan toleransi dikaitkan dengan perubahan budaya masyarakat dari model gotong royong menjadi model kompetitif. Dari perkotaan ke pedesaan, setiap orang bersifat individual, dibagi menjadi mayoritas dan minoritas. Namun, dalam hal komunikasi antar pemuka agama, sekarang sudah lebih baik. Tokoh Kristen dapat berkomunikasi dan bertukar kunjungan dengan tokoh Islam dan sebaliknya. Bersama-sama mereka dapat pergi ke petani, sekolah Islam dan sebaliknya, pemimpin Islam dapat mengunjungi lembaga-lembaga Kristen. Namun, suasana persaingan telah mengubah sifat pemeluk agama, terjerumus ke dalam perangkap prasangka dan kecurigaan terhadap pemeluk agama lain. Dalam masyarakat multikultural, konflik dan integrasi merupakan pasangan dialektis. Ketegangan, atau konflik dalam bahasa teknis sosiologi, adalah kesatuan dengan pluralisme. Tidak akan ada pluralisme tanpa ketegangan, kecuali jika ia dirancang sedemikian rupa untuk menutupi konflik. Ketika umat yang berbeda agama berinteraksi, kemungkinan terjadinya ketegangan menjadi sangat terbuka saat itu,

¹ Michael Walzer, *On Tolerance* (New York: Yale University, 1997), h. 19.

² *Ibid.*, h. 20.

dan ketegangan antar pemeluk agama dapat disebabkan oleh beberapa hal.³

Pertama, karena faktor di luar agama itu sendiri, seperti faktor sosial, ekonomi menyangkut kesenjangan, kemiskinan, dan kecemburuan karena tidak terwujudnya keadilan sosial. Pada satu tempat, ternyata tingkat ekonomi komunitas minoritas suatu agama lebih baik lalu menimbulkan kecemburuan. Kondisi ini lantas diperparah dengan perlakuan tidak adil dari penguasa setempat terhadap warga menurut kategori kelompok agama.

Kedua, faktor dalam. Tidak dapat ditolak bahwa agama, di dalam dirinya sendirinya mengandung potensi konflik yang tidak kecil. Ada teks-teks suci yang kerap dijadikan sebagai alat justifikasi untuk melakukan tindak kekerasan dan intoleran terhadap pihak atau kelompok agama lain. Secara demikian, konflik dapat terjadi secara natural sebagai konsekuensi logis atas adanya perbedaan tadi, meskipun dalam banyak kasus bisa juga karena direkayasa. Sementara itu, di tengah perbedaan keyakinan itu, setiap pemeluk dituntut berkompetisi menjalankan kebaikan, yang dalam terminologi Islam dikenal dengan istilah *fastabiqul khairat*³. Secara ideal, tokoh dan umat semua agama dapat mengajak untuk saling berkomunikasi, berelasi dan berkomunikasi dalam konteks tugas-tugas kemanusiaan yang lebih luas dan menuntut keterlibatan semua manusia dengan tidak memandang perbedaan agama yang dianut.

Secara faktual, terdapat persoalan tentang bagaimana hubungan umat lintas agama di tengah pluralitas agama. Dalam konteks ini, ada indikasi bahwa pluralitas agama belumlah berkorelasi secara positif dengan terbangunnya toleransi beragama. Kenyataan tidak jarang malah memberi indikasi sebaliknya: pluralitas agama seringkali menjadi pemicu konflik sosial dan sentimen keagamaan. Padahal, kalangan elite baik elite intelektual, elite birokrasi, maupun elite agama- sedang aktif mengusung wacana toleransi, inklusivisme, dan bahkan pluralisme. Jadi, tampaknya terjadi keterputusan wacana secara kontradiktif yang jika tidak dijembatani, akan semakin mengarah pada terjadinya jurang wacana antara kalangan elite dengan masyarakatnya di level akar rumput.

³ Zuhairi Misrawi, *Al-Quran Kitab Toleransi: Inklusivisme, Pluralisme, Dan Multikulturalisme* (Jakarta: Fitrah, 2007), h. 23.

Sejauh ini, isu tentang toleransi beragama, inklusivisme dan pluralisme memang cenderung menjadi wacana yang hanya dikenal di lapisan elite. Ia tercipta dan bergerak hanya pada tahap elite intelektual, birokrasi, agama, dan elite masyarakat lainnya tanpa mengakar pada masyarakat bawah. Proses penciptaan, pematangan, dan penyebaran wacana pun, lebih banyak bergerak di sekitar lingkaran elite tadi. Karena itu, mensosialisasikan wacana itu hanya sebatas di kalangan elite, tidak saja mengakibatkan wacana itu terlalu elitik, tetapi juga menjadikan wacana itu mengalami ketidaknyambungan dengan problem keumatan di tingkat akar rumput.⁴

Memang, keragaman suku dan agama bisa menjadi aset berharga dalam membangun toleransi yang kuat di satu sisi, tetapi di sisi lain berpotensi besar untuk konflik. Potensi konflik antar suku dan agama dalam masyarakat tetap tinggi. Fakta ini kemudian menimbulkan pertanyaan baru tentang hubungan dialektis, yang terkadang problematis, antar pemeluk agama. Masalah ini memang menjadi kendala kronis, terutama dalam masyarakat multikultural.

Kenyataan ini telah menarik kalangan pemerintah untuk secara serius berperan dalam membangun kehidupan keagamaan yang lebih toleran, bebas konflik, dan saling mengapresiasi. Terlepas dari berbagai motif yang melatarinya, peran aktif pihak pemerintah dalam mengatur kehidupan beragama warganya menarik untuk dicermati. Bagaimanapun, secara realitas, kehidupan beragama di Indonesia sama sekali tidak bisa dipisahkan dari Negara. Sekalipun Indonesia dikenal sebagai bukan Negara agama, tetapi Indonesia dihuni oleh warga yang diwajibkan memeluk agama. Maka dalam kaitan demikian, kemudian lahirlah berbagai regulasi yang mengatur kehidupan Beragama di Indonesia. Tentu saja, berbagai regulasi yang ada pada umumnya dimaksudkan untuk mengatur kehidupan umat beragama. Dalam konteks relasi lintas agama, regulasi itu dimaksudkan untuk melakukan upaya pendamaian terhadap perselisihan antarumat beragama, terutama yang menyangkut penyiaran agama dan pendirian rumah ibadah. Mengamati fenomena kehidupan umat beragama memang menarik, apalagi hal ini terkait

⁴ Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Masa Depan Kebebasan Dan Kerukunan Beragama Di Indonesi Dalam Taber, Elga Peldi (Ed.). 2009. Merayakan Kebebasan Beragama: Bunga Rampai 70 Tahun Djohan Effendi* (Jakarta: Kompas dan ICRP, 2009), h. 34.

dengan pola hubungan sosial antarkomunitas yang berbeda secara agama. Untuk menguatkan jalinan toleransi umat lintas agama ini, tampaknya masih diperlukan berbagai pendekatan untuk saling mengapresiasi.

Diakui bahwa untuk mampu hidup nyaman dalam ruang multi agama dan budaya, masyarakat masih perlu melakukan berbagai pendekatan untuk saling mengapresiasi, sehingga tumbuh toleransi yang dinamik dengan tetap memelihara identitas individual masing-masing. Setiap anggota masyarakat, baik minoritas maupun mayoritas, memiliki hak dan kewajiban yang sama. Melalui perlakuan yang sama ini, komunikasi sosial di antara warga juga berlangsung cair. Secara faktual, terbangunnya toleransi beragama di suatu daerah, dapat diindikasikan pada sikap dan perilaku sosial umat beragama. Tulisan ini mengkaji problematis relasi dialektis dalam masyarakat multikultural.

B. Pembahasan

a) Konsep Toleransi

Secara konseptual, istilah toleransi bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri. Ia berkaitan dengan berbagai konsep lain, seperti intoleransi, akseptasi, mayoritas-minoritas, dialog lintas agama, serta pluralisme agama yang semuanya merupakan bagian integral yang ada dalam dinamika sosial umat lintas agama. Secara bahasa, term toleransi berasal dari bahasa Latin, *tolerare*, yang memiliki makna membiarkan pihak lain yang memiliki pandangan atau sikap lain tanpa dihalang-halangi. Dalam konteks ilmu biologi, term toleransi dipakai untuk membiarkan berkembangnya sebuah kelainan biologis yang terjadi pada tubuh seseorang, seperti kutil. Kutil yang tumbuh di tubuh seseorang mestinya dihilangkan namun dibiarkan tetap ada dan tumbuh karena dianggap tidak membahayakan tubuh orang yang memilikinya. Secara demikian, keberadaan kutil itu sangat tergantung dari kemauan dan kerelaan orang yang bersangkutan. Pada dunia kedokteran, istilah ini dipergunakan untuk mengacu kepada bahan-bahan yang diizinkan untuk pengobatan. Misalnya, di dalam pengobatan penyakit tertentu digunakan zat yang mengandung narkotika atau zat adiktif lainnya sampai pada batas toleransi tertentu. Sementara, dalam ilmu tumbuhtumbuhan, istilah ini merujuk pada

kemampuan suatu organisme menolak pengaruh suatu parasit virus atau dari faktor lingkungan.

Toleransi sebenarnya tidak bermakna bahwa seseorang harus melepaskan keyakinan agamanya demi bisa bergaul dan berinteraksi dengan umat agama lain yang berbeda. Toleransi berarti mengizinkan perbedaan itu tetap ada dan tidak memaksa yang berbeda menjadi sama. Toleransi semacam ini akan menjadi pembuka jalan bagi terwujudnya kebebasan dalam beragama. Namun demikian, setiap pemeluk agama akan mengekspresikan kebebasannya secara bertanggung jawab. Toleransi sama sekali tidak dapat dimaknai sebagai sebuah sikap yang pasif yang menerima apa adanya.

Oleh sebab itu, toleransi tidak membenarkan seseorang untuk merelatifkan keyakinan-keyakinannya, apalagi sampai terjebak pada relativisme. Dalam konteks ini, toleransi memberi ruang kepada seseorang untuk belajar tentang kepercayaan-kepercayaan lain, mendengarkannya dengan terbuka, tanpa harus memeluk kepercayaan itu. Dengan demikian, dalam hubungannya dengan agama dan kepercayaan, yang kemudian secara teknis disebut dengan istilah toleransi beragama, berarti suatu sikap menghargai, membiarkan, membolehkan kepercayaan, agama yang berbeda itu tetap ada, walaupun berbeda dengan agama dan kepercayaan seseorang. Dalam perspektif sosiologi, pengertian toleransi sering dimaknai sebagai bentuk akomodasi tanpa persetujuan yang formal. Ada kalanya, toleransi muncul tanpa disadari dan juga tanpa direncanakan, karena adanya watak perorangan atau kelompok-kelompok manusia, untuk sedapat mungkin menghindarkan diri dari suatu perselisihan⁵.

Secara historis, Indonesia dikenal sebagai bangsa yang amat toleran yang sedapat mungkin menghindarkan diri dari perselisihan. Bahkan, seringkali perselisihan dijadikan sebagai hal yang paling dihindari. Bangsa Indonesia bangsa yang sangat cinta damai, dan mereka menjadikan toleransi sebagai jalan hidup mereka. Pada proses berikutnya kemudian terjadi apa yang disebut sebagai asimilasi. Terkait asimilasi ini,⁶ mengatakan, Proses asimilasi ditandai dengan

⁵ Walzer, *On Toleration*, h. 32.

⁶ Brent Nelson, *Assimilation: The Ideal and the Reality* (USA: American Immigration Control Foundation, 1987), h. 27.

pengembangan sikap-sikap yang sama, walaupun kadang-kadang bersifat emosional, bertujuan untuk mencapai kesatuan, atau paling sedikit untuk mencapai suatu integrasi dalam organisasi, pikiran dan tindakan. Proses asimilasi timbul bila ada: (1) kelompok manusia yang berbeda kebudayaannya; (2) orang perorangan sebagai warga kelompok-kelompok tadi saling bergaul secara langsung dan intensif untuk waktu yang lama; sehingga (3) kebudayaan dari kelompok manusia tersebut masing-masing berubah dan saling menyesuaikan diri.

Secara kategori, toleransi terbagi ke dalam dua bagian besar. Pertama, toleransi pasif, yaitu setiap pemeluk agama membiarkan tanpa menghalang-halangi pemeluk agama lain menyatakan dan mengekspresikan keimanannya. Kedua, toleransi aktif, yaitu suatu sikap membantu pemeluk agama yang berbeda untuk melaksanakan keyakinan yang berbeda dengan yang dimilikinya. Dalam paradigma lama kehidupan beragama, kegiatan dakwah atau misi agama-agama kerap kali diwarnai dengan prasangka teologis sepihak dengan klaim-klaim sepihak dan memosisikan orang yang berbeda keyakinan sebagai musuh yang harus ditaklukan. Dalam paradigma baru, sikap yang ditumbuhkan adalah mutual respect, saling mengakui eksistensi (mutual recognition), berpikir dan bersikap positif⁷. Dalam paradigma lama, kontestasi misi agama dilakukan dengan maksud untuk menguasai dan mendominasi pasar sendiri dan orang lain secara tidak fair dan sering melampaui batas kepatutan, dalam paradigma baru kontestasi berjalan secara fair dan berjalan di atas koridor hukum yang disepakati bersama. Setiap pemeluk agama, di tengah perbedaan yang ada, dituntut untuk berlomba dalam kebaikan. Dalam paradigma baru orientasinya bersifat ke dalam, yakni ke komunitas agamanya sendiri dan tidak berekspansi untuk menaklukan komunitas agama yang berbeda. Dalam paradigma baru ini, kontak alami manusiawi adalah prasyarat terpenting bagi terwujudnya kehidupan beragama yang toleran dan damai. Tidak ada situasi yang membuat seorang pemeluk agama menjadi terpaksa. Hal dimaksud tentu saja bukan toleransi negatif (*negatif tolerance*) sebagaimana yang dulu pernah dijalankan oleh Orde Baru yang sedang berkuasa, tetapi toleransi positif (*positive tolerance*). Sikap toleransi negatif adalah sikap yang

⁷ Misrawi, *Al-Quran Kitab Toleransi: Inklusivisme, Pluralisme, Dan Multikulturalisme*, h. 28.

penuh kepura-puraan, tidak asli, semu, dan menampakkan hal yang tidak sejati. Toleransi semacam ini mendorong orang untuk tidak menonjolkan agamanya di hadapan pemeluk agama lain. Jika Anda Kristen, maka jangan menonjol-nonjolkan kekristenan Anda di hadapan orang Muslim, demikian pula sebaliknya. Sementara itu, toleransi positif adalah toleransi yang sebenarnya, yang mendorong setiap umat beragama untuk jujur mengakui dan mengekspresikan keberagamaannya tanpa ditutup-tutupi, apa adanya. Secara demikian, identitas masing-masing umat beragama tidak tereliminasi, bahkan masing-masing agama dengan bebas dapat mengembangkan dan mengekspresikannya. Inilah toleransi yang dulu pernah dianjurkan oleh mending sejarawan Kuntowijoyo⁸.

Secara makna, toleransi adalah manifestasi hidup berdampingan secara damai dan saling menghargai di antara keragaman yang ada. Dalam konteks Indonesia, pelaksanaan toleransi beragama mengalami dinamika, pasang surut, naik turun, yang seringkali diwarnai oleh pemahaman distingtif yang bertumpu pada relasi mereka dan kita, mayoritas dan minoritas. Dalam kategori yang nyaris sama⁹, menyebut dua jenis toleransi, yakni toleransi formal dan toleransi material. Lebih jauh,¹⁰ mengatakan, Toleransi formal berarti membiarkan saja pandangan-pandangan dan praktik-praktik politik atau agama yang tidak sesuai dengan pandangan kita sejauh itu tidak mengganggu. Sementara toleransi material bermakna suatu pengakuan terhadap nilai-nilai positif yang mungkin terkandung dalam pemahaman yang berbeda itu. Dalam konteks ini, menurut Yewanggoe¹¹, agama-agama yang dipandang politeistik sering lebih supel dan ramah daripada agama-agama monoteistik yang sangat eksklusif dan kurang terbuka. Agama-agama profetis, disebabkan oleh pretensinya yang absolut, acapkali menjadi intoleran. Sementara itu, agama-agama mistik justru memperlihatkan hal yang kebalikannya: toleransi yang tinggi. Dalam kaitan dengan relasi umat beragama di Indonesia, daripada toleransi, Yewanggoe lebih memilih

⁸ Raja Juli Antoni Antoni, *Living Together in Plural Societies; Pengalaman Indonesia Inggris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), h. 34.

⁹ Andreas Yewanggoe, —*Regulasi Toleransi Dan Pluralisme Agama Di Indonesia Dalam Taber, Elza Peldi (Ed.). Merayakan Kebebasan Beragama: Bunga Rampai 70 Tahun Djohan Effendi*. (Jakarta: Kompas dan ICRP, 2009), h. 78.

¹⁰ Ibid., h. 81.

¹¹ Ibid., h. 82.

untuk memakai istilah kerukunan. Menurut Yewanggoe¹², istilah kerukunan lebih dinamik, kreatif, dan positif. Dalam pemakaian istilah kerukunan ditemukan watak autentik bangsa Indonesia yang memang dari sananya sudah senang berinteraksi dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan agama yang dianut.

b) Konsep Intoleransi

Jika dibuat ibarat, demokrasi dan toleransi adalah seperti dua sisi berbeda dari keping uang yang sama. Satu sama lain saling melengkapi dan menggenapkan. Jika salah satu dari keduanya tiada, maka lenyap pula kekuatan yang satunya. Demokrasi tanpa toleransi akan memunculkan situasi yang barbar dan otoritarianistik, sedangkan toleransi tanpa demokrasi akan melahirkan toleransi semu yang rentan memunculkan konflik-konflik. Dalam hal demikian, dibutuhkan barometer atau tolok ukur untuk melihat sampai mana toleransi dan intoleransi dipraktikkan dalam kehidupan sebuah Negara. Untuk melihat toleransi, menurut Misrawi¹³, ada sejumlah level toleransi dari yang paling bawah sampai tingkatan toleransi yang paling tinggi. Pertama, hidup berdampingan secara damai dan saling menghormati satu sama lain (*co-existence*). Ini adalah level toleransi yang paling bawah, di mana masing-masing pihak dapat hidup secara damai meskipun di antara mereka tidak saling mengenal. Kedua, hadirnya kesadaran dan keterbukaan untuk melihat pemeluk agama berbeda sebagai sesama warga negara dan makhluk Tuhan yang mempunyai kesempatan sama di depan hukum (*awarnes*).

Keterbukaan dan kesadaran semacam ini merupakan konsekuensi logis dari tumbuhnya kesadaran perihal pentingnya toleransi. Level ini dipandang lebih baik dari koeksistensi, karena telah menumbuhkan keterbukaan terhadap kelompok lain yang berbeda. Ketiga, pengenalan terhadap pemeluk agama yang berbeda sambil melakukan dialog konstruktif (*mutual learning*). Pada praktiknya, pengenalan dapat dipandang sebagai fase amat penting dalam mewujudkan toleransi, hal itu tidak lain karena toleransi pada tahap awalnya dimulai dengan pengenalan yang bersifat holistik terhadap pihak atau kelompok yang berbeda. Keempat, pemahaman atas

¹² Ibid.

¹³ Misrawi, *Al-Quran Kitab Toleransi: Inklusivisme, Pluralisme, Dan Multikulturalisme*, h. 35.

kelompok lain (*understanding*). Langkah ini juga merupakan salah satu tahapan dalam toleransi, karena tidak mungkin kehidupan yang damai dan toleran terbangun tanpa pemahaman terhadap kelompok lain. Institusi pendidikan dan lembaga-lembaga berbasis masyarakat memiliki tanggung jawab dan peran yang besar untuk membangun kesepahaman, sehingga tercipta kesepahaman di antara berbagai kelompok. Kelima, penghormatan dan pengakuan terhadap kelompok lain (*respect*). Terkait toleransi, apresiasi dan penghormatan terhadap grup atau kelompok lain yang berbeda dipandang sebagai barometer untuk melihat sejauh mana setiap warga bisa memahami pentingnya kehidupan bersama yang damai, toleran dan saling menghormati. Keenam, penghargaan pada persamaan dan perbedaan, serta merayakan kemajemukan (*value and celebration*). Dalam masyarakat yang plural seperti halnya di Indonesia, perbedaan merupakan sebuah keniscayaan yang tidak terhindarkan. Hanya saja, di antara berbagai kelompok yang berbeda tersebut menyimpan persamaan yang dijadikan sebagai kekuatan untuk membangun kehidupan bersama yang lebih baik dan terhormat. Secara demikian, toleransi mengandaikan adanya penghargaan terhadap perbedaan dan persamaan.

Untuk melihat realitas intoleransi dalam sebuah masyarakat, juga menggunakan enam barometer¹⁴:

Pertama, penolakan atas status dan akses yang sama terhadap kelompok lain yang berbeda. Kedua, pandangan dan sikap yang menganggap kelompok lain lebih rendah dari diri atau kelompoknya (*de-humanization*). Secara demikian, dapat dikatakan bahwa dehumanisasi pada dasarnya merupakan sebuah bentuk intoleransi beragama yang sangat serius, karena salah satu nilai terpenting dalam toleransi yakni kesetaraan menjadi terabaikan.

Ketiga, pengabaian hak-hak sipil, politik, dan ekonomi (*opression*). Pemerintahan atau rezim yang represif atau otoritarianistik cenderung melakukan tindakan yang mengabaikan atau bahkan mencederai hak-hak sipil. Keempat, penyerangan dan melakukan pembunuhan. Sudah sangat jelas, penyerangan adalah sebuah tindakan intoleransi yang sangat serius, karena dapat menimbulkan korban yang sangat banyak dari pihak-pihak yang seharusnya dihormati dan

¹⁴ Ibid., h. 36.

dilindungi. Kelima, pengorganisasian pembunuhan massal (*mass-violence*). Dapat dikatakan bahwa salah satu bentuk pembunuhan masal yang populer untuk konteks zaman sekarang adalah munculnya fenomena terorisme. Keenam, pembasmian atas dasar identitas (*genocide*). Apa yang dilakukan oleh rezim Nazi terhadap kalangan Yahudi di Jerman merupakan salah satu bentuk pembasmian terhadap identitas tertentu. Pada negara-negara berkembang, seperti Indonesia, biasanya netralitas negara bukanlah sesuatu yang *taken for granted*. Ia harus senantiasa diupayakan terus-menerus. Pada titik itulah dibutuhkan *civil religion* atau agama sipil. *Civil religion* merupakan sekumpulan nilai dan norma yang dihasilkan dari agama-agama yang ada untuk menjamin suatu kehidupan bersama yang lestari dalam suasana masyarakat yang plural, semacam kontak sosial dalam kehidupan bermasyarakat dan kehidupan bernegara atau politik dengan agama berperan sebagai kekuatan perekat bagi pertanggungjawaban hati nurani masyarakat. Karena itu, setiap agama yang ada dalam sebuah negara dapat memenuhi fungsi yang sama. Dalam konteks Indonesia, telah ada sumber *civil religion* yang kukuh, yaitu sila pertama dari Pancasila. Tetapi, gaungnya masih belum nyaring, senyaring wacana penegakan syariat Islam. Tampak ironis bahwa kebangkitan agama yang telah berlangsung selama beberapa dekade ini hanyalah kebangkitan simbolisme dan formalisme agama dan kurang menyentuh tatanan moral-etis agama. Karena itu, kebangkitan agama, hanya dimaknai sebatas zikir dan pengajian-pengajian rutin di televisi, radio, dan ruang-ruang publik lainnya, tetapi belum (tidak?) memiliki implikasi sosial dalam menyumbangkan perannya bagi konflik antar agama dan antaretnik, korupsi yang merajalela, peningkatan angka kejahatan dan kekerasan, diskriminasi minoritas, dan kesenjangan sosial.

Sebagaimana ditunjukkan Jose Casonova dalam *Public Religion in the Modern World*, bahwa agama sesungguhnya dapat memainkan peran di ruang publik. Turunannya, gerakan serta berbagai institusi berlabel agama dapat mengisi ruang-ruang publik dengan al-hal yang konstruktif untuk membangun kehidupan bersama yang harmonis. Hal itu hanya dapat dilakukan dengan melakukan deprivatisasi agama di dunia modern. Agama tetap berada di wilayah privat, tetapi juga ia dapat berperan di ranah publik. Artinya, sebagai iman personal, setiap penganut agama memiliki

kebebasan untuk meyakini agama tertentu beserta seluruh perangkat doktrin teologis dan ritualnya. Yang lebih penting, mengganggu kenyamanan beribadah dan pemaksaan untuk memeluk sebuah agama dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Dalam konteks wilayah publik, umat beragama, gerakan-gerakan, maupun organisasi-organisasi keagamaan (*civil religion*) tidak hanya relevan, tetapi juga dapat memainkan fungsi kritisnya dan dapat menggalang pemberdayaan masyarakat dalam menyikapi persoalan-persoalan modernitas, seperti ketimpangan sosial, ketidakadilan, diskriminasi minoritas, penegakan HAM, dan proses demokratisasi lebih lanjut.

c) Konsep Akseptasi

Gufran Ali Ibrahim¹⁵ menjelaskan dalam paradigma multikultural, konflik sosial menjadi pertanda bahwa toleransi saja tidak cukup kuat untuk menjadi peranti kohesi sosial lintas-komunitas. Toleransi memang dapat menggerakkan kebersediaan mengakui komunitas atau warga lain, tetapi ia tetap menempatkan warga lain itu dalam posisi orang luar. Dengan begitu, tetap saja ada jarak psikososial. Sementara itu, pembudidayaan akseptasi, yaitu mekanisme penerimaan komunitaslain dalam kesadaran koeksistensi, mendorong proses dan pembelajaran mengenai dasar-dasar hidup-bersama. Lebih jauh, Gufran Ali Ibrahim¹⁶ mengatakan, Dengan akseptasi, orang-orang luar (*out-group* dalam terminologi sosiologi), orang-orang yang berbeda dalam realitas pluralis, ditarik masuk ke dalam kosmopolit kesadaran kelompok dalam (*in-group*), sementara dalam toleransi setiap warga tetap menempatkan orang luar sebagai yang terpisah dari kesadaran kelompok dalam. Oleh sebab itu, bila ada faktor pemicu lain bagi kemungkinan terberainya ikatan-ikatan sosial, proses penempatan orang luar sebagai ciri toleransi, dengan mudahnya masyarakat yang beragam itu tercerai-kerai. Faktor pemicu konflik komunal yang kemudian menguatkan kembali solidaritas mekanik (*mechanical solidarity*) meminjam istilah Emile Durkheim setiap komunitas yang diikat oleh nilai kebersamaan, keyakinan, pengalaman, dan nasib, bangunan sosial yang berciri pluralisme itu dengan gampangnya terkoyak. Akan tetapi, bila proses akseptasi telah

¹⁵ Gufran Ali Ibrahim, *Mengelola Pluralisme* (Jakarta: Grasindo, 2004), h. 7.

¹⁶ Ibid.

menjadi bagian dari pembudidayaan pluralisme dan dalam etos pertetanggaaan (*neighborhood*), hubungan antarwarga yang berbeda komunitas tetap dapat dipertahankan. Dengan demikian, untuk membangun masyarakat Indonesia dengan semangat pemeliharaan pluralisme, bangunan sosial budaya paling mendasar dan pertama yang perlu dibangun adalah pembudidayaan akseptasi, penerimaan, dan bukan saja toleransi. Toleransi akan terbangun bila ada sebuah proses pelatihan dan pembelajaran akseptasi, di mana setiap warga dalam lintas komunitas mengembangkan suatu sikap individu dan sikap sosial mengenai saling-menerima. Saling-terima dapat tumbuh dengan baik bila penghargaan atas hak-hak, penyesuaian dan pengakuan, perlakuan dan pelayanan sosial yang setara, keterwakilan politik, dan akses ekonomi yang berjalan secara adil dan setimbang. Ikhtiar ini akan mendorong tingginya partisipasi dan partisipasi itu mendorong toleransi karena semua merasa mendapatkan akses dan mobilitas yang adil. Dengan begitu, penegakan semangat pluralisme, termasuk pluralisme budaya dapat diwujudkan.

Merujuk pada pandangan Gufran Ali Ibrahim¹⁷, terdapat empat strategi budaya dalam mengembangkan akseptasi: (1) memboboti kualitas perjumpaan lintas-komunitas, (2) membudidayakan semangat bertetangga, (3) selalu memelihara nurani dan akal sehat, dan (4) membangun sumber daya sosial (*social resources*) yang tangguh. Satu siasat pluralisme ini bisa jadi secara serta-merta melahirkan siasat yang lain. Perjumpaan adalah mekanisme interaksi sosial untuk saling paham, mengenal dan dikenal. Dengan strategi melintasi (*passing over*) dan kembali ke diri sendiri (*coming back*) akan menghadirkan penghargaan atas orang lain, tetapi tanpa diri sendiri menjadi lebur. Perjumpaan tidak saja membuat kita dapat memahami orang lain, tetapi juga sekaligus membuat kita semakin memahami secara lebih mendalam watak kita sendiri dalam bercermin pada watak dan budaya orang lain. Perjumpaan dapat dilakukan secara alamiah atau berdasarkan sebuah rekayasa budaya.

Perjumpaan alamiah berlangsung berdasarkan kebiasaan-kebiasaan kita dalam mengenal dan memahami orang lain, sedangkan perjumpaan yang direkayasa adalah perjumpaan yang dimotori oleh sekelompok orang mulai dari merancang gagasan, meramu

¹⁷ Ibid.

pembelajaran massal, rencana lapang, hingga pengamalan atasnya di lapangan nyata. Satu dari sekian banyak perjumpaan dengan rekayasa adalah membuat gerakan apresiasi pluralisme yang dipelopori oleh kaum terdidik, tokoh yang kredibel, dan sekolah. Perjumpaan itu akan melahirkan semangat bertetangga dalam arti luas. Semangat bertetangga itu akan mendekonstruksi kesadaran baru dalam sebuah watak konvergensi dengan tetap memelihara kehadiran kelompok dan komunitas sendiri dalam bingkai kelompok lain. Dengan begitu, pengagungan kelompok atau komunitas sendiri tidak dilakukan secara berlebihan tetapi proporsional karena ditegakkan dalam pembudidayaan nurani dan akal sehat. Perjumpaan akan melahirkan tradisi baru bertetangga yang terus mengelola nurani dan akal sehat sebagai sarana kemanusiaan semesta yang diboboti oleh cinta dan penghargaan.

Memboboti kualitas perjumpaan, membudidayakan semangat bertetangga, dan selalu memelihara nurani dan akal sehat adalah sumber daya sosial yang penting dalam cara membudidayakan akseptasi. Gagasan mengenai empat strategi budaya dalam membudidayakan akseptasi ini memang masih berada pada aras ide yang abstrak. Untuk mewujudkannya secara konkret, gagasan ini perlu terus digodok, dikoreksi, dan diperdebatkan sehingga melahirkan sebuah skema kebudayaan bagi, tidak saja peleraian konflik komunal, tetapi juga memberikan kerangka pembelajaran bagi cara-cara berkehidupan dalam pluralisme yang niscaya itu. Dalam konteks ini, Gufran Ali Ibrahim¹⁸ menawarkan sebuah skema pembobotan akseptasi dalam praktik nyata seperti mendorong pembelajaran mengenai pluralisme di lembaga-lembaga pendidikan, pembacaan kembali teks-teks agama mengenai pluralisme, dan mengeksplorasi kearifan lokal (*local wisdom*) yang berkaitan dengan harmoni dan cinta lingkungan. Ini semakin relevan karena sekarang sekolah mulai membelajarkan diri dengan mendorong konsep pendidikan berbasis luas (*broad base education*). Pertama, pembelajaran mengenai pluralisme ini perlu agar anak tidak akan bergerak dewasa dengan komunitas sendiri, tetapi secara afektif telah membelajarkan diri dalam hubungan-hubungan penerimaan mengenai pluralisme. Kedua, teks-teks agama mengenai cinta damai, hargai sesama, yang selama ini terbenamkan oleh tema pokok mengenai klaim kebenaran

¹⁸ Ibid., h. 8.

dan klaim keselamatan, perlu dibaca kembali, dimaknai kembali. Dengan demikian, keberagaman tidak hanya merupakan proses pencapaian prestasi spiritual keilahian, tetapi juga sekaligus sebagai sarana pencerahan sosial. Langkah ketiga yang perlu dibelajarkan adalah membaca kembali kearifan lokal pada setiap maujud budaya di Indonesia dan kearifan lokal mengenai cinta sesama, harmoni, dan cinta lingkungan. Ini hendaknya disalurkan melalui media sehingga berlangsung proses perjumpaan dan pemahaman lintas-budaya secara masif.

d) Konsep Akomodasi

Akomodasi dimaknai sebagai kemampuan dalam menyesuaikan, memodifikasi atau mengatur perilaku seseorang dalam responsnya terhadap orang lain yang ada di sekitarnya. Proses akomodasi ini pada umumnya dilakukan secara tidak sadar¹⁹ (West dan Lynn . Teori akomodasi menyatakan bahwa setiap orang dalam melakukan interaksi dengan orang lain memiliki pilihan dan akan berupaya sekerasnya untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian atau adaptasi. Hal mendasar dari akomodasi ialah proses kerja sama dan toleransi yang memperlihatkan warga masyarakat dengan tidak menghilangkan atau menyembunyikan identitas masing-masing. Umumnya, setiap orang ataupun kelompok dalam suatu masyarakat bertindak atau melakukan sesuatu digerakkan dan dirangsang oleh apa yang menjadi kepentingan atau tujuan yang ingin mereka capai. Dalam memenuhi setiap kepentingan baik individu maupun kelompok dapat melahirkan dua kemungkinan, yakni adanya kerja sama antar individu maupun antar kelompok dan adanya persaingan dalam memenuhi kepentingan mereka masing-masing. Para teoretisi akomodasi telah sampai pada kesimpulan bahwa akomodasi menjadi hal penting dalam relasi sosial di tengah-tengah masyarakat. Ia dapat membawa kepada identitas sosial dan dapat mengikat ketidaksetujuan dan jarak sosial dalam masyarakat. Dalam pemaknaan yang umum, akomodasi biasa disebut dengan penyesuaian, yaitu suatu keadaan atau proses manakala kelompok-kelompok yang bertentangan satu sama lainnya sepakat guna menghentikan pertentangan melalui suatu

¹⁹ Richard dan Lynn Turner West, *Introduction Communication Theory* (Jakarta: Salemba, 2007), h. 17.

interaksi²⁰. Secara demikian, dengan menggunakan ungkapan yang bereda dapat dikatakan bahwa akomodasi adalah suatu proses penyesuaian untuk meredakan pertentangan dan perbedaan yang tumbuh melalui proses penyesuaian diri (adaptasi). Akomodasi adalah wadah yang tersedia untuk menampung berbagai perbedaan yang muncul dan meletakkannya dalam situasi yang aman.

Akomodasi merupakan kecenderungan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan sendiri sering melahirkan perilaku yang khas. Persaingan yang didasarkan atas ego (baik ego pribadi maupun ego kelompok), keserakahannya, ambisi, haus akan kekuasaan tidak menutup kemungkinan dapat menimbulkan pertentangan, baik antar individu maupun antar kelompok. Pertentangan antar individu maupun antar kelompok merupakan sumber potensial bagi teretusnya suatu konflik. Dalam situasi persaingan, jika individu maupun kelompok sudah memasuki wilayah tujuan, maka individu atau kelompok yang lain tidak akan bisa mencapai wilayah tujuan mereka masing-masing. Dalam kondisi demikian, ada

kecenderungan antarindividu atau antarkelompok akan saling menghambat dalam pencapaian tujuan mereka. Sedangkan dalam situasi kerja sama, individu atau kelompok akan saling menunjang dengan individu ataukelompok lainnya dalam upaya mencapai tujuan mereka. Anggota dalam kelompok kerja sama akan lebih banyak saling menolong daripada anggota kelompok persaingan. Penyesuaian (adaptasi) lebih dapat terjadi dalam

situasi kerja sama daripada dalam situasi persaingan. Dalam konteks relasi antar pemeluk agama di Indonesia, interaksi antarumat berbeda agama didasari oleh adanya suasana kontestasi kepentingan di antara mereka. Interaksi antarumat beragama dalam sejarahnya telah ditandai oleh suasana persaingan dan kontestasi ini. Kontestasi ini tidak jarang menimbulkan riak-riak di permukaan, tetapi kadang pula menghadirkan gelombang besar dalam bentuk konflik bernuansa agama dalam skala yang tidak kecil.

Relasi sosial yang terjalin di antara umat lintas agama tidak pernah berjalan dalam satu keadaan yang tetap, melainkan

²⁰ Judistira K.Garna, *Ilmu-Ilmu Sosial: Dasar-Konsep-Posisi* (Bandung: PPS Unpad, 1996), h. 153.

berlangsung dalam situasi yang terus berubah dari satu waktu ke waktu yang lain. Hal ini sejalan dengan kecenderungan manusia itu sendiri yang selalu berubah-ubah. Di satu sisi, kadang-kadang manusia memiliki kecenderungan untuk

melakukan tindakan yang baik dan kadang-kadang ingin melakukan tindakan yang jahat. Dalam konteks ini, terdapat pandangan yang mengatakan bahwa manusia memiliki dua kecenderungan yaitu kecenderungan otonomi dan homonomi. Kecenderungan ke arah otonomi merupakan ekspansi yang dilakukan oleh organisme dengan jalan mengasimilasikan dan mengurus lingkungan. Kondisi ini serupa dengan dorongan egoistik di mana orang berusaha untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan mengembangkan kepentingan-kepentingan dengan cara menyesuaikan lingkungan dengan kebutuhan-kebutuhannya. Sementara itu, kecenderungan ke arah homonomi dinyatakan dengan sejumlah saluran khusus, misalnya keinginan akan superioritas, akuisisi atau penguasaan, eksplorasi, dan prestasi. Kecenderungan ke arah homonomi mendorong orang untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan serta berbagi hasil dan berpartisipasi dalam sesuatu yang lebih luas daripada individu itu sendiri.

Menurut perspektif teori pertukaran sosial, kecenderungan relasi sosial lintas agama yang cenderung terus berubah tadi sebagai fenomena biasa dalam kehidupan umat beragama yang selalu fluktuatif, karena di antara umat beragama setiap saat selalu bersentuhan, bergaul dan melakukan interaksi sosial satu sama lain. Melalui interaksi antar umat beragama, satu sama lain saling memberikan makna terhadap sikap dan perilaku sosial umat beragama secara dialektik. Umat beragama secara aktif dan kreatif berinteraksi saling memberikan respons satu sama lain.

Dengan demikian, lingkungan sosial yang terdiri dari simbol verbal, simbol nonverbal dan lingkungan fisik sangat mempengaruhi bagaimana umat beragama berinteraksi secara lintas agama. Fluktuasi interaksi antarumat beragama terjadi karena dipengaruhi oleh lingkungan sosial tersebut. Ketika lingkungan sosial bernuansa positif, maka interaksi antarumat beragama berlangsung efektif, damai, toleran dan terbuka. Sebaliknya, ketika lingkungan sosial tidak kondusif, maka hubungan antarumat beragama mengalami kemacetan. Karena tindakan seorang individu berdasarkan

interpretasi yang diberikan terhadap lingkungan sosialnya, yang mempengaruhi dirinya. Dalam perspektif teori pertukaran sosial, umat beragama bersikap toleran dan terbuka karena ia juga berharap mendapatkan hal yang sama. Secara teoretis, lingkungan sosial yang tidak kondusif sangat mengganggu hubungan antarumat beragama. Interaksi antarumat beragama dengan sendirinya akan mengalami kemunduran yang sangat rendah, sehingga menimbulkan suasana yang disharmoni, bahkan melahirkan kecurigaan satu sama lain. Berkenaan dengan hal itu,²¹ menjelaskan, bahwa makna yang diberikan individu umat beragama berhubungan langsung dengan interaksi sosial yang dilakukan individu dengan lingkungan sosialnya. Umat beragama menyadari betul betapa pentingnya hidup rukun dan damai, sehingga umat beragama selalu mengedepankan sikap-sikap yang positif, antara lain: memiliki perasaan yang sama sebagai anak bangsa, saling menghargai dan menghormati, saling mengucapkan salam, dan saling berbagi dalam peringatan hari-hari besar agama, serta menghadiri upacara keagamaan masing-masing.

Akomodasi adalah salah satu strategi yang dapat ditempuh dalam mewujudkan toleransi beragama. Dalam salah satu bentuknya, akomodasi dilakukan dalam bentuk deklarasi. Deklarasi, sebagai sebuah media sosial tempat berkumpulnya berbagai tokoh lintas agama, di satu sisi, telah menjadi alat untuk menyikapi sekaligus mengantisipasi berbagai hal yang dianggap dapat mengancam keselamatan kehidupan beragama. Sementara, di sisi lain, deklarasi juga telah menjadi strategi akomodasi terhadap berbagai kepentingan yang disuarakan oleh berbagai kelompok keagamaan. Perbedaan keyakinan dan kepentingan adalah kenyataan yang tidak dapat ditawar. Namun demikian, hal itu tidak menghalangi umat yang berbeda agama dan kepentingan untuk hidup secara bersama-sama. Dalam konteks itulah pemilihan strategi yang tepat dalam mengelola kontestasi yang terjadi di kalangan antarumat beragama menjadi sesuatu yang penting.

²¹ Engkus Kuswarno, *Fenomenologi* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 26.

C. Kesimpulan

Perubahan relasi antar umat beragama dari masa ke masa terjadi secara pasang surut, kadang-kadang berlangsung begitu toleran dan damai, tetapi dalam kesempatan yang lain terjadi disharmoni, saling curiga, berprasangka negatif dan diskriminatif. Oleh sebab itu, para tokoh agama dituntut untuk terus memperluas cara pandang yang mempunyai semangat toleransi dan keterbukaan. Perluasan dan pengayaan tafsir seperti ini dipercaya mampu mencerahkan kehidupan umat beragama secara keseluruhan. Sehingga agama tampil secara lebih fungsional, bahkan mampu mengkreasikan kedamaian, toleransi dan nilai-nilai luhur kehidupan lainnya dalam bermasyarakat. Perbedaan tradisi agama dan budaya tidak menjadi penghambat untuk menjalin hubungan dan kerja sama lintas agama.

Daftar Pustaka

- Antoni, Raja Juli Antoni. *Living Together in Plural Societies; Pengalaman Indonesia Inggris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Ibrahim, Gufran Ali. *Mengelola Pluralisme*. Jakarta: Grasindo, 2004.
- K.Garna, Judistira. *Ilmu-Ilmu Sosial: Dasar-Konsep-Posisi*. Bandung: PPS Unpad, 1996.
- Kuswarno, Engkus. *Fenomenologi*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Ma'arif, Ahmad Syafi'i. *Masa Depan Kebebasan Dan Kerukunan Beragama Di Indonesi Dalam Taber, Elza Peldi (Ed.). 2009. Merayakan Kebebasan Beragama: Bunga Rampai 70 Tahun Djohan Effendi*. Jakarta: Kompas dan ICRP, 2009.
- Misrawi, Zuhairi. *Al-Quran Kitab Toleransi: Inklusivisme, Pluralisme, Dan Multikulturalisme*. Jakarta: Fitrah, 2007.
- Nelson, Brent. *Assimilation: The Ideal and the Reality*. USA: American Immigration Control Foundation, 1987.
- Walzer, Michael. *On Toleration*. New York: Yale Univesity., 1997.
- West, Richard dan Lynn Turner. *Introduction Communication Theory*. Jakarta: Salemba, 2007.
- Yewangoe, Andreas. *Regulasi Toleransi Dan Pluralisme Agama Di Indonesia Dalam Taber, Elza Peldi (Ed.). Merayakan Kebebasan Beragama: Bunga Rampai 70 Tahun Djohan Effendi*. Jakarta: Kompas dan ICRP, 2009.